

Potret Intervensi di Bilik Redaksi

Tim Penyusun: AJI Semarang

B4

Potret Intervensi di Bilik Redaksi

© AJI Semarang

Tim Penyusun : Pratono, Triyono Lukmantoro, Sohirin, Heri C
Santoso, Edi Faisol, Amin Fauzi, Em Syukron,
Rafiudina, Tandiyo Pradekso, Adi Nugroho

Editor Bahasa : Tubagus P Svarajati

Staf Riset : Nur Ana Mustafidah

Cover/Illustrasi : Abdullah Ibnu Thalhah

Foto : Arif "Slam" Nugroho

Layout : Yuswinardi

Diterbitkan oleh:

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang

Februari 2014

ISBN

14x20 cm, Tebal: 164 halaman

Alamat:

Jalan Gergaji I/15 Mugassari, Semarang - Telp: 024-8450980

Email: ajisemarang@yahoo.com

Twitter: @AJIkotaSMG

Didukung oleh Yayasan Tifa

DAFTAR ISI:

| | |
|---|-----|
| Daftar isi | ii |
| Kata Pengantar | v |
| Pendahuluan | ix |
| Testimoni Jurnalis dan Redaktur | |
| Cerita Tsunami Selepas Magrib | 1 |
| Langkahku Terganjil Iklan | 9 |
| Tekanan itu Selalu Ada | 17 |
| Menulis di Bawah Tekanan | 23 |
| Berharap Besar dari Sukses Ganjar | 29 |
| Demi Oplah, Kritik Diolah | 35 |
| Media: Butuh <i>Jeneng</i> , Juga <i>Jenang</i> | 43 |
| Sudah Digebugi Tertimpa Koran Lagi | 57 |
| Ketika Sensor Datang dari Segala Penjuru | 63 |
| Riset Kuantitatif | 71 |
| Riset Kualitatif | 111 |
| Daftar Pustaka | 147 |
| Profil AJI Semarang | 149 |

Riset Kuantitatif

Melihat Independensi Media Lokal dari Sisi Obyektivitas Pemberitaan Politik dan Hukum

Latar belakang

Himbauan moral yang menyatakan secara tegas bahwa pers yang terbit di Semarang supaya bersikap independen selalu dikemukakan. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini pers di daerah ini memang belum mampu menunjukkan sikap independensinya. Kerugian yang didapatkan akibat pers yang tidak independen adalah pembaca tidak mampu mendapatkan informasi yang lengkap. Bahkan, lebih dari itu, informasi yang memiliki nilai kepentingan yang tinggi bagi kehidupan publik justru tidak dapat diakses. Akibat yang paling buruk dalam situasi demikian adalah publik mengalami pengelabuan informasi karena pers telah mendistorsikan realitas.

Banyak kemungkinan yang menjadikan pers tidak independen. Apabila dilihat dari pendekatan lembaga media (*media institution*), sebagaimana dikemukakan oleh Curran, Gurevitch, dan Woollacott (dalam Gurevitch, *et. al.* [eds.], 1982: 16), setidaknya ada empat pokok persoalan yang menjadikan pers tidak independen. Hal pertama adalah struktur kelembagaan dan hubungan-hubungan peran. Persoalan yang kedua adalah kepentingan ekonomi politik lembaga media. Masalah yang ketiga ialah ideologi-ideologi profesional dan

praktik-praktik kerja. Dan, permasalahan terakhir yakni interaksi lembaga media dengan lingkungan sosial-politiknya.

Apabila keempat hal itu diuraikan lebih mendalam lagi, maka apa yang disebut sebagai independensi ruang pemberitaan (*newsroom*) dapat dideskripsikan seperti ini. Pertama, secara internal pada organisasi ruang pemberitaan terjadi pembagian kerja dan distribusi kewenangan. Kalangan reporter yang berada di lapangan untuk menjalankan liputan boleh jadi telah bersikap independen terhadap suatu kasus. Tapi, editor atau redaktur yang jabatannya berada lebih atas ternyata tidak bersikap independen. Relasi peran yang bersifat tidak setara (asimetris) ini jelas menjadikan ruang pemberitaan tidak memiliki independensi yang memadai.

Kedua, kepentingan ekonomi politik institusi media merujuk pada bagaimana pemilik media mempunyai agenda tertentu dalam pemberitaan. Pemilik media, misalnya saja, memiliki bisnis non-media yang bermasalah dengan lingkungan, atau secara sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, atau punya ambisi supaya perusahaannya terkenal. Salah satu dari agenda terselubung yang dikendalikan oleh pemilik media semacam itu jelas mengakibatkan ruang pemberitaan tidak memenuhi syarat-syarat independensi.

Terlebih lagi ketika pemilik media tersebut menjadi pengurus salah satu partai politik atau setidaknya simpatisan dari organisasi kemasyarakatan tertentu. Pada akhirnya, dia memposisikan media yang dimilikinya sebagai sebuah

instrumen untuk menyuarakan kepentingan politik tertentu pula.

Ketiga, ideologi-ideologi profesional dan praktik-praktik kerja yang terdapat dalam diri setiap wartawan tidaklah seragam. Para wartawan, tentu saja, sudah sangat paham apa pengertian berita. Mereka juga sangat fasih untuk membedakan peristiwa yang memiliki nilai berita tinggi atau tidak.

Mereka tidak perlu diragukan lagi kemampuannya untuk meliput berbagai peristiwa. Hanya saja semua pengetahuan dan kecakapan teknis itu tidak diimbangi dengan pemahaman dan komitmen secara moral. Padahal, apa yang disebut dengan independensi berada dalam domain moralitas media yang tidak mudah disosialisasikan apalagi dipraktikkan dalam kerja sehari-hari.

Terakhir, atau keempat, interaksi media dengan lingkungan sosial-politiknya. Lembaga media tidak pernah hidup dan bertumbuh dalam kevakuman sosial. Justru media mampu menunjukkan kesuksesannya ketika berhasil menjalankan adaptasi dan menyiasati lingkungan sosial-politik yang melingkupinya. Apalagi jika dilihat secara lebih cermat akan menunjukkan bahwa media tidak berbeda dengan bisnis lainnya, yakni menjual komoditas dalam bentuk informasi.

Independensi media bisa demikian terpengaruh karena media sangat ditentukan eksistensinya oleh pihak-pihak eksternal, seperti masyarakat secara umum, pelanggan, pemerintah, pemasang iklan, berbagai organisasi kemasyarakatan, dan bahkan dengan para pesaingnya sendiri.

Independensi ruang pemberitaan media menjadi sebuah persoalan yang punya kompleksitas yang tinggi. Sebabnya adalah independensi itu tidak sekadar berkaitan dengan komitmen ataupun, sebaliknya, pelanggaran moral yang dilakukan wartawan secara individual. Independensi yang terjadi dalam ruang pemberitaan melibatkan banyak aspek, dari persoalan bisnis sampai politis, yang bertali-temali dengan aktor-aktor yang tidak mudah dilacak jejak-jejaknya dalam mempengaruhi kebijakan ruang redaksional. Secara tegas dapat dikemukakan bahwa semua pemangku kepentingan media, baik dalam lingkup internal maupun domain eksternal, memiliki peluang-peluang untuk mempengaruhi independensi ruang pemberitaan.

Perumusan masalah

Independensi, sebagaimana ditulis *Oxford Advanced Learner's Dictionary: 7th Edition* (2005: 789), memiliki pengertian "kebebasan dari kontrol politik oleh negara-negara lain". Kalau hal ini diterapkan dalam kasus pemberitaan pers, independensi bisa dimaknai sebagai "kebebasan pers, dalam hal ini ruang pemberitaan, dari kontrol pihak-pihak lain". Siapa yang disebut sebagai pihak-pihak lain itu adalah kekuatan eksternal yang dianggap bisa memengaruhi kebebasan wartawan dalam menentukan agenda pemberitaan. Ruang pemberitaan yang independen dimengerti sebagai tidak adanya satu pihak pun yang menjalankan intervensi terhadap proses kerja wartawan, baik itu yang bersifat bisnis, sosial, maupun

yang bercorak politis.

Hanya saja konsep tentang independensi tersebut tidak dikenal dalam literatur kajian media ataupun jurnalistik. Independensi, agaknya, lebih mencuat sebagai suatu keinginan, sebuah harapan, yang dikehendaki oleh kalangan wartawan untuk tidak mendapatkan campur tangan dari rezim politik yang sedang berkuasa. Di samping itu, independensi bisa juga merujuk pada aspirasi para wartawan untuk tidak diintervensi secara bertubi-tubi oleh kepentingan bisnis, sosial, dan politis pemilik media.

Konsep yang sudah dikenal untuk menggantikan pengertian independensi adalah obyektivitas. Dalam pemahaman itu bisa juga dibedakan bahwa independensi merujuk pada tidak adanya intervensi terhadap wartawan dalam proses pemberitaan. Sementara itu, apa yang disebut sebagai obyektivitas merujuk pada hasil kerja wartawan, dalam hal ini berita, yang tidak menunjukkan indikasi keberpihakan terhadap kepentingan tertentu.

Dalam konteks demikian, penelitian ini mendeskripsikan tentang obyektivitas yang ditunjukkan oleh sejumlah lembaga pers yang terdapat di Semarang, yaitu *Suara Merdeka*, *Wawasan*, *Jawa Pos Radar Semarang*, *Koran Sindo edisi Jateng*, dan *Tribun Jateng* dalam pemberitaan-pemberitaannya. Karena obyektivitas pers secara hipotetis sangat rentan untuk diintervensi terutama dalam tema politik dan hukum, maka fokus pemberitaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kedua topik tersebut.

Tujuan penelitian

Mendeskripsikan obyektivitas pemberitaan yang ditampilkan *Suara Merdeka*, *Wawasan*, *Jawa Pos Radar Semarang*, *Koran Sindo edisi Jateng*, dan *Tribun Jateng* dalam kasus-kasus politik dan hukum.

Kerangka pemikiran

Obyektivitas, sebagai pengertian yang merujuk pada hasil pemberitaan yang berasal dari proses pembuatan berita yang dijalankan wartawan secara independen, sebenarnya menjadi perdebatan tersendiri dalam dunia jurnalistik. Pertanyaan yang menggugat keberadaan obyektivitas muncul ketika terdapat pandangan bahwa apa yang disebut sebagai obyektivitas itu merupakan hal yang tidak mungkin dijangkau dalam berita-berita yang diproduksi kalangan wartawan.

Persoalan lainnya mencakup pandangan terhadap konsekuensi apabila obyektivitas benar-benar diterapkan dalam berita. Pertanyaan yang bergulir berikutnya adalah kira-kira siapakah yang mendapat keuntungan dengan penyajian berita-berita yang memiliki obyektivitas itu. Terlebih lagi jika pemberitaan pers menyoroti kasus-kasus konflikual yang menghadapkan secara diametral antara kelompok mayoritas versus kelompok minoritas, apa pun yang dimaksudkan dengan konsep itu, seperti agama, seks, gender, etnis, ras, dan kelas. Maka, berita yang dikatakan obyektif justru seharusnya memihak kaum mayoritas.

Potter (2005: 9) pernah menjelaskan bahwa pada tahun 1996, U.S. Society of Professional Journalists melenyapkan kata obyektivitas dari kode etiknya. Alasan yang dikemukakan adalah jurnalis pada dasarnya merupakan manusia biasa. Kalangan jurnalis itu memiliki kepedulian terhadap pekerjaan mereka dan sudah pasti mereka memiliki pendapat juga. Dengan menyatakan bahwa kalangan jurnalis harus bersikap obyektif sama dengan memandang mereka sebagai pihak-pihak yang tidak memiliki nilai-nilai. Jadi, hal yang harus tetap diperhatikan adalah jurnalis memang memiliki nilai atau pandangan tertentu. Hanya saja nilai atau pandangan tersebut harus tetap dikontrol dengan baik sehingga tidak menghasilkan pemberitaan yang bias.

Dengan demikian, pendapat yang menyatakan bahwa hasil pemberitaan para jurnalis harus obyektif masih tetap dianggap sebagai kewajiban moral yang mutlak dilakukan sekalipun perdebatan mengenai konsep itu masih saja terjadi. Artinya, berita-berita yang obyektif dianggap sebagai penanda bahwa wartawan mempunyai kinerja yang baik.

Selain para wartawan wajib menguasai kompetensi teknis, seperti paham bahwa berita harus memuat unsur-unsur 5W dan 1H (*Who, What, Where, When, Why, dan How*) serta nilai-nilai berita (*news values*), misalnya saja aktualitas, proksimitas, popularitas, kontroversi, dampak, masih dibicarakan, dan keunikan, mereka pun harus mematuhi aturan-aturan etis. Salah satu etika yang tidak bisa diabaikan adalah konsep yang disebut dengan obyektivitas.

Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa obyektivitas secara konseptual lebih ketat dibandingkan dengan konsep ketidakberpihakan (*impartiality*). Apabila ketidakberpihakan mencakup pengertian tentang kejujuran, bahkan benar-benar jujur ketika berkepentingan dengan orang lain, dan akurasi, maka obyektivitas melampaui hal tersebut. Obyektivitas mengandaikan ada sesuatu yang secara eksternal dapat diobservasi di luar pemikiran kita dan ada fakta-fakta yang dapat diverifikasi terpisah dari nilai-nilai subyektif yang dimiliki oleh wartawan.

Dari pengandaian tersebut, maka jurnalisme yang obyektif mempunyai tiga karakteristik, yaitu memisahkan fakta dari opini, menyajikan keseimbangan ketika media memberitakan sebuah perdebatan, dan melakukan validasi pernyataan-pernyataan jurnalistik dengan merujuk kepada pihak-pihak lain yang mempunyai otoritas (Franklin, *et. al.*, 2005: 177). Namun, dalam pengertian itu pun sebenarnya masih terdapat bias subyektivitas. Hal ini dikarenakan sumber-sumber yang dianggap memiliki otoritas sekalipun pasti akan menunjukkan sifat subyektifnya ketika memberikan pernyataan-pernyataan.

Pendapat hampir serupa tentang obyektivitas dikemukakan pula oleh Boyer (sebagaimana dikutip McQuail, 1993: 184-185), yang mengemukakan enam elemen utama, yakni: (1) berimbang dan benar-benar jujur dalam menghadirkan sisi-sisi yang berbeda dari sebuah isu; (2) akurasi dan menganut prinsip realisme dalam reportase; (3) menyajikan

seluruh hal penting yang relevan; (4) memisahkan fakta dari opini; (5) meminimalkan pengaruh dari sikap, pendapat ataupun keterlibatan penulis; dan (6) menghindarkan tujuan yang bersifat mengarahkan, menimbulkan kebencian, dan melakukan penipuan.

Tentu saja, berbagai konsep dan upaya untuk menampilkan detail operasional tentang obyektivitas dapat dituliskan secara lebih panjang. Hanya saja persoalan yang tidak kalah penting dan jauh lebih substansial adalah bagaimana hal itu dijalankan ketika wartawan menuliskan berita. Bahkan, untuk membedakan peristiwa yang dianggap layak dijadikan berita atau tidak pun telah melahirkan perdebatan tersendiri. Misalnya saja berita yang seringkali melibatkan elite masyarakat dan elite bangsa (pendapat Galtung dan Ruge ini dikutip oleh Fleming, *et. al.*, 2006: 5-6). Inilah yang dalam nilai berita disebut sebagai elemen *prominence* (keterkenalan), sehingga memunculkan hukum besi dalam jurnalisme, yaitu *name makes news* (nama membuat berita). Lain halnya dengan orang-orang kecil yang baru bisa diberitakan kalau melakukan suatu perbuatan yang dianggap luar biasa (*extraordinary*) atau di luar kelaziman (*unusual*).

Terlepas dari berbagai perdebatan tentang konsep obyektivitas, persoalan yang relevan dikemukakan adalah obyektivitas merujuk pada bagaimana berita harus dikaji secara teliti, diorganisasikan, serta dihadirkan. Dalam sudut pandang demikian, obyektivitas dapat diartikan sebagai kehadiran secara jujur, berimbang, dan tidak memihak peristiwa-peristiwa

dalam pemberitaan yang semata-mata didasarkan pada fakta dan tanpa penafsiran apa pun terhadapnya.

Dalam teknik penulisan berita, obyektivitas semacam itu dapat dicapai dengan empat langkah pokok, yakni: (1) berita ditulis dalam format piramida terbalik yang berarti bagian-bagian paling penting dari berita mendapatkan prioritas utama; (2) sudut pandang yang digunakan dalam penulisan berita adalah orang ketiga; (3) setidaknya terdapat dua pihak yang dituliskan ketika berita menyoroti persoalan tertentu yang secara potensial atau riil mengandung konflik; dan (4) berita memuat kutipan pernyataan dari ahli yang dianggap memiliki kompetensi di bidang yang sedang disoroti media. Kriteria ini dapat diberlakukan dalam jenis medium apa pun (Turow, 2009: 55).

Format penulisan piramida terbalik yang dianggap memiliki obyektivitas itu bukan merupakan hal yang baru dalam jurnalistik. Piramida terbalik merupakan teknik penulisan dasar yang mengharuskan wartawan menuliskan terlebih dahulu elemen-elemen dari kejadian yang dianggap paling penting sampai kurang penting bagi khalayak.

Format penulisan dengan gaya piramida terbalik lazim digunakan dalam berita-berita yang memuat nilai berita aktualitas. Penggunaan sudut pandang orang ketiga (*third person*) dalam penulisan berita diyakini mampu menjaga jarak keterlibatan antara wartawan dengan pihak (obyek) lain yang sedang diliputnya. Alasannya, sudut pandang penceritaan orang

ketiga diandaikan mampu memosisikan jurnalis di luar arena persoalan yang sedang disorotinya.

Berita yang dianggap bagus dan mempunyai nilai berita yang tinggi biasanya jika memuat unsur kontroversi, perdebatan, konflik, pro-kontra, atau apa pun istilah yang mampu digunakan untuk menghadirkan pertikaian dua pihak atau lebih. Bahkan, dalam dunia jurnalisme sendiri, terutama jurnalisme tabloid yang mengandalkan sensasionalisme, dikenal slogan yang sangat terkenal "*if it bleeds, it leads*", semakin berdarah-darah semakin bagus.

Dalam dunia jurnalistik yang hendak menunjukkan kualitas pemberitaan yang obyektif, maka slogan tersebut ditinggalkan. Obyektivitas menjadi salah satu tujuan dalam pemberitaan dengan cara memuat pernyataan semua pihak yang terlibat dalam pertengkaran. Pada akhirnya, kutipan pernyataan dari seseorang yang dianggap berkompeten dalam bidang yang diperdebatkan pun menjadi tolok ukur apakah suatu berita dapat dinilai obyektif atau sebaliknya. Tentu saja, pihak berkompeten yang dikutip pernyataannya itu tidak boleh terlibat atau menjadi bagian dalam perdebatan yang sedang diliput oleh media.

Secara historis, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus jurnalisme di Amerika Serikat, konsep tentang obyektivitas berkaitan erat dengan keberadaan media untuk tidak memberikan dukungan (*nonpartisanship*) kepada pihak mana pun. Bahkan, bisa dikemukakan bahwa *nonpartisanship* adalah

elemen pertama yang harus dipenuhi pers untuk menakar obyektivitas (Powers dalam Sterling [ed.], 2009: 1028). Apa yang bisa ditegaskan adalah perumusan tentang obyektivitas media dapat dituliskan sesuai selera masing-masing pihak. Tapi, persyaratan pertama yang bersifat absolut bagi pers untuk bisa bersikap obyektif adalah tidak mendukung siapa pun yang terlibat dalam konflik atau setidaknya perdebatan. Ketika pers, baik secara terselubung maupun eksplisit, sudah menunjukkan pemberian dukungan terhadap salah satu pihak yang bertikai, maka apa yang disebut secara berbusa-busa sebagai obyektivitas tidak perlu ditelusuri lagi keberadaannya.

Definisi konseptual dan operasional

Obyektivitas secara konseptual dapat dijabarkan sebagai kehadiran secara jujur, berimbang, dan tidak memihak peristiwa-peristiwa dalam pemberitaan yang semata-mata didasarkan pada fakta dan tanpa penafsiran apa pun terhadapnya.

Beberapa hal yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah:

1. *Topik berita*: a. Politik. Berita-berita yang menyoroti berbagai persoalan konflik kepentingan dari para pihak pemegang kekuasaan, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga-lembaga lain (organisasi kemasyarakatan dan organisasi non-pemerintah) yang memiliki relevansi di dalamnya; dan b. Hukum. Berita-berita yang menghadirkan

peristiwa pengadilan, pengusutan kasus hukum oleh pihak yang berwajib (kepolisian dan kejaksaan), dan pihak-pihak lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan persoalan ini.

2. *Jenis-jenis berita*: a. *Hard news*. Berita yang mengandalkan aspek kebaruan; b. *Soft news*. Berita yang menonjolkan aspek *human interest* yang lazim disebut dengan *feature*; c. Reportase investigatif. Berita yang ditulis secara mendalam untuk mengungkap suatu kasus; dan d. Editorial. Tulisan yang dimuat pada kolom tajuk rencana dan sejenisnya yang menunjukkan sikap media terhadap suatu kasus tertentu yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat.
3. *Cara wartawan mendapatkan berita*: a. Wawancara. Wartawan mewawancarai narasumber secara bertatap muka, melalui telepon, ataupun surat; b. Observasi. Wartawan melakukan pengamatan terhadap kejadian atau keadaan yang diberitakan secara langsung; c. Riset. Wartawan melakukan kajian pustaka untuk menampilkan data-data sekunder dalam pemberitaan; dan d. Gabungan. Wartawan melakukan gabungan antara dua atau tiga teknik pengumpulan berita itu
4. *Asal-usul berita*: a. Peristiwa-peristiwa yang bersifat alamiah, seperti kecelakaan atau bencana alam; b. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan secara baik, misalnya konferensi pers atau pertemuan; dan c. Usaha-usaha yang dilakukan oleh wartawan sendiri, misalnya berinisiatif untuk menghubungi narasumber.

5. Nilai-nilai berita (*news values*) yang ditonjolkan: a. Aktualitas. Nilai berita yang menonjolkan aspek kebaruan suatu peristiwa; b. Proksimitas. Nilai berita yang menonjolkan aspek kedekatan secara geografis dengan khalayak; c. Kontroversi. Nilai berita yang menonjolkan konflik atau pertikaian dua pihak atau lebih; d. Keterkenalan. Nilai berita yang menonjolkan nama-nama orang atau tempat yang sudah dikenal secara luas oleh publik; e. Dampak. Nilai berita yang menonjolkan suatu peristiwa memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat; f. *Currency*. Nilai berita yang menonjolkan suatu peristiwa masih tetap dibicarakan dalam kehidupan masyarakat; dan g. Keluarbiasaan. Nilai berita yang menonjolkan aspek keunikan, keanehan, atau keluarbiasaan yang dialami atau terdapat pada orang, binatang, dan lingkungan pada umumnya.
6. Teknik penulisan berita: a. Berita ditulis dalam format piramida terbalik yang berarti bagian-bagian paling penting dari berita mendapatkan prioritas utama; b. Sudut pandang penceritaan yang digunakan dalam pemberitaan adalah orang ketiga (*third person*); c. Setidaknya ada dua pihak yang dituliskan ketika berita menyoroti persoalan tertentu yang secara potensial atau riil mengandung konflik; dan d. Berita memuat kutipan pernyataan dari pihak ahli yang dianggap memiliki kompetensi di bidang yang sedang disoroti media.

Metode penelitian

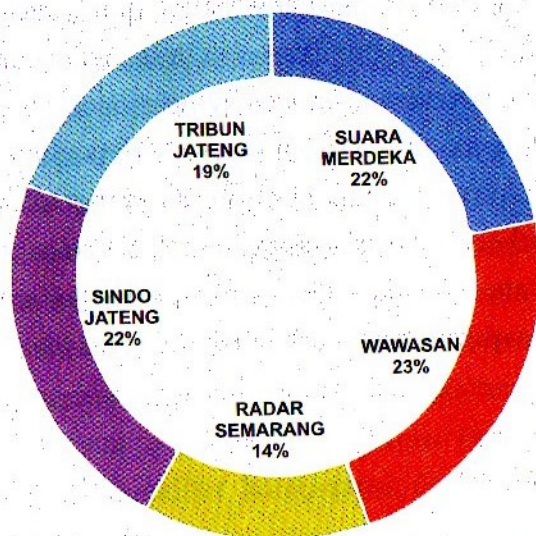
Penelitian ini bertipe deskriptif dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi dari teks secara obyektif dan terukur dalam kaitannya dengan penggunaan teks tersebut (Krippendorff, 2004: 18). Untuk memastikan hasil yang obyektif dan terukur tersebut, dilakukan proses replikasi pencatatan teks yang sama oleh orang-orang yang berbeda dan selanjutnya dilakukan uji reliabilitas yang diukur dengan uji korelasi di antara mereka. Kategorisasi konseptual digunakan sebagai pedoman oleh para pencatat teks (*coder*) untuk melakukan pencatatan dan mengelompokkannya kedalam tabel yang sudah dipersiapkan.

Obyek yang dikaji dalam penelitian ini adalah berita-berita bertopik politik dan hukum dalam wilayah liputan (*coverage area*) Semarang pada edisi Juli, Agustus, dan September 2013 yang ditampilkan oleh lima media cetak, yaitu *Suara Merdeka*, *Wawasan*, *Jawa Pos Radar Semarang*, *Koran Sindo edisi Jateng*, dan *Tribun Jateng*. Data dikumpulkan dengan mendokumentasikan berita-berita yang telah dipilih dengan merujuk pada kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dalam bentuk penyajian gambar (grafik) yang menunjukkan distribusi frekuensi dan tabulasi silang.

Temuan-temuan

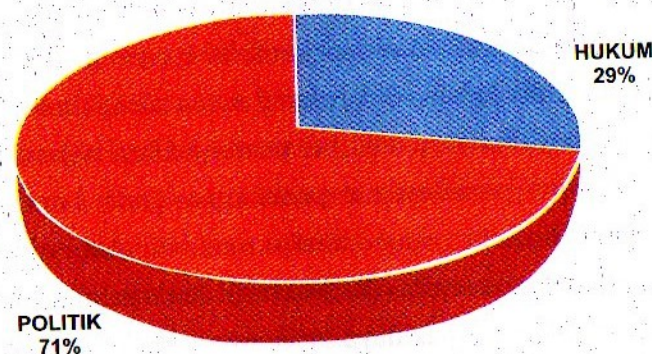
Berikut ini disajikan temuan-temuan penelitian yang ditampilkan dalam bentuk gambar atau grafik. Temuan-temuan penelitian ini diolah dari sebanyak 728 berita politik dan hukum dalam wilayah liputan Semarang yang dihadirkan oleh *Suara Merdeka*, *Wawasan*, *Radar Semarang*, *Koran Sindo edisi Jateng*, dan *Tribun Jateng*. Beberapa hal substansial lain yang dideskripsikan adalah proporsi topik berita, jenis berita, cara mendapatkan berita, asal berita, *news values* (nilai-nilai berita), teknik penulisan berita, dan perbandingan masing-masing surat kabar dalam sejumlah indikator yang menunjukkan obyektivitas.

Gambar 1
SURAT KABAR



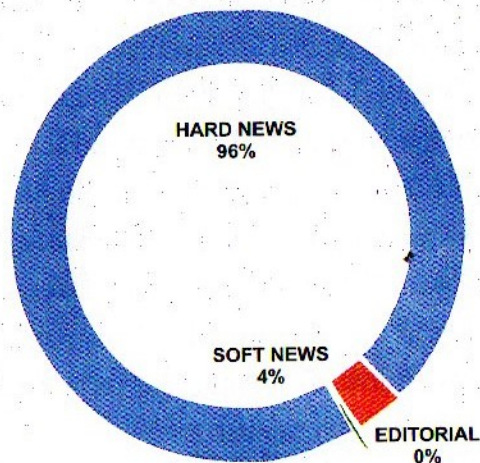
Gambar 1 menunjukkan proporsi (jumlah) berita yang terdapat dalam masing-masing surat kabar. Proporsi terbesar terdapat pada *Wawasan*, *Suara Merdeka*, dan *Koran Sindo edisi Jateng*. Sementara proporsi paling kecil terdapat pada *Tribun Jateng* dan *Radar Semarang*. Hal yang menarik dilihat adalah *Koran Sindo edisi Jateng* sebagai surat kabar yang terbit di Jakarta dan hanya memberikan halaman tambahan (suplemen) untuk wilayah liputan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata banyak memberikan perhatian pada peristiwa-peristiwa politik dan hukum yang terjadi di Semarang.

Gambar 2
TOPIK BERITA



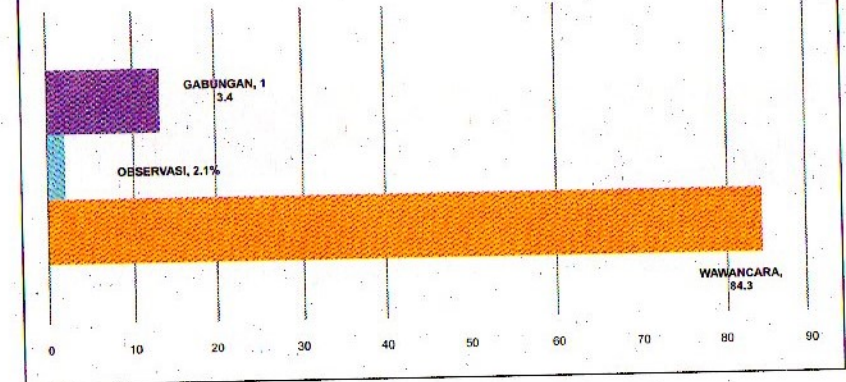
Tema atau topik berita yang secara dominan disajikan oleh kelima surat kabar itu adalah politik. Sementara itu proporsi topik berita hukum kurang dari sepertiga, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2. Hal ini menunjukkan bahwa lima media yang terbit di Semarang lebih mempunyai ketertarikan menyoroti peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kekuasaan pada level lokal daripada kejadian-kejadian hukum.

Gambar 3
JENIS BERITA



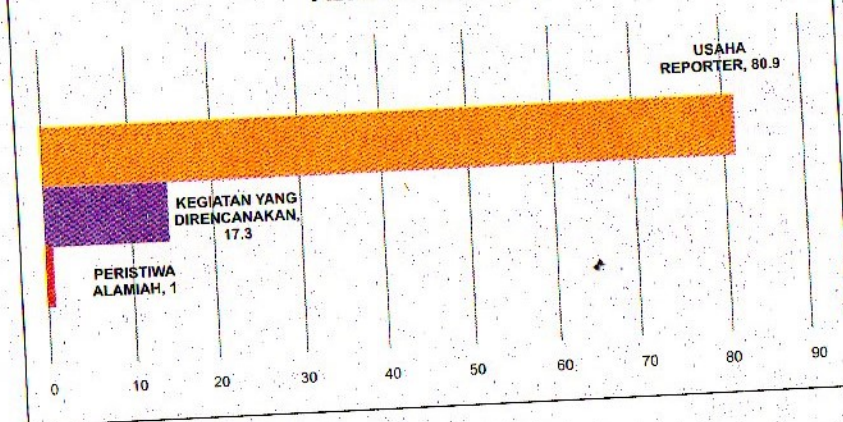
Secara sangat dominan jenis berita yang ditampilkan oleh semua surat kabar adalah *hard news* sebagaimana dapat disimak pada Gambar 3. Hal ini menunjukkan bahwa kelima media tersebut memberikan penekanan pada berita-berita politik dan hukum yang mempunyai muatan aktualitas (kebaruan) dan proksimitas (kedekatan). Jenis pemberitaan lain yang menunjukkan aspek daya tarik manusia (*human interest*) berformat feature (*soft news*) menunjukkan proporsi yang sangat kecil.

Gambar 4
CARA MENDAPATKAN BERITA (%)



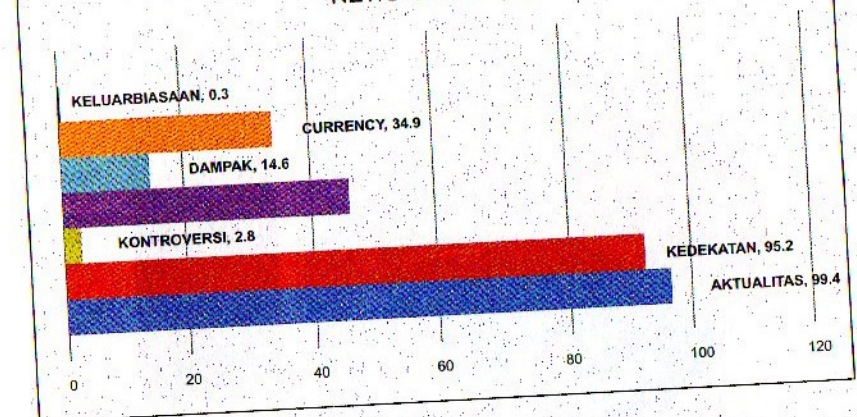
Teknik dominan yang digunakan oleh kalangan wartawan di Semarang dalam mengumpulkan berita bertema politik dan hukum adalah wawancara seperti dapat dilihat pada Gambar 4. Pengamatan (*observasi*) sebagai cara mendapatkan berita sangat sedikit diterapkan. Sementara itu gabungan antara wawancara dan pengamatan menunjukkan proporsi yang juga sangat rendah. Bahkan, teknik penting lain, yakni riset dalam wujud penelusuran literatur atau kajian terhadap data-data sekunder, tidak pernah dikerahkan untuk mendukung pemberitaan-pemberitaan politik dan hukum. Dengan demikian, berita-berita yang ditampilkan pun sedemikian dominan bercorak *talking news*, yakni jenis berita yang sekadar memuat berbagai hasil wawancara atau pernyataan-pernyataan dari para narasumber.

Gambar 5
ASAL BERITA (%)



Upaya yang dilakukan oleh para reporter merupakan hal yang sangat dominan pada bagaimana berita diproduksi atau dari mana berita berasal sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5. Usaha yang dijalankan oleh kalangan reporter ini, misalnya, menghubungi para narasumber untuk diwawancarai. Sementara itu, berbagai kegiatan yang direncanakan, seperti konferensi pers atau seminar, memperlihatkan proporsi yang rendah. Peristiwa-peristiwa yang bersifat alamiah, misalnya kecelakaan ataupun bencana alam, menunjukkan proporsi yang sangat kecil. Secara keseluruhan hal itu mendeskripsikan bahwa pemberitaan politik dan hukum yang terjadi di Semarang memang secara sangat dominan diproduksi dari hasil prakarsa para wartawan.

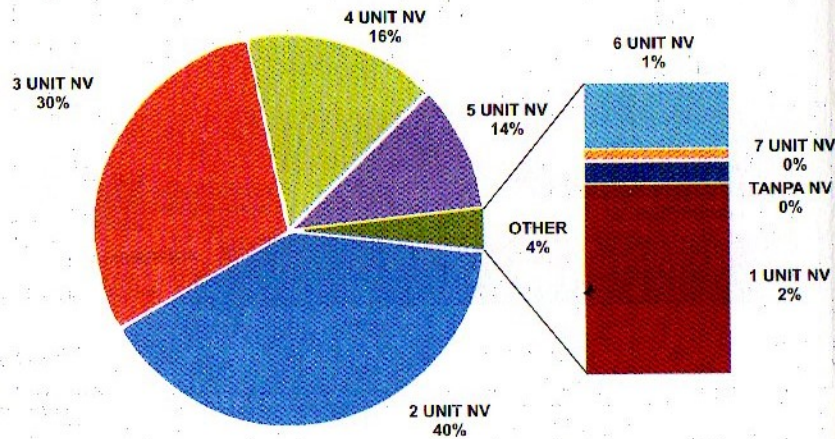
Gambar 6
NEWS VALUE (%)



Nilai-nilai berita (*news values*) adalah kriteria yang digunakan para jurnalis untuk menakar apakah suatu peristiwa layak diberitakan karena mengandung unsur-unsur, seperti kebaruan, kedekatan, keterkenalan, konflik, dampak, masih dibicarakan, dan keluarbiasaan. Gambar 6 menunjukkan bahwa hampir semua berita politik dan hukum yang disajikan oleh kelima surat kabar itu memuat unsur aktualitas dan proksimitas.

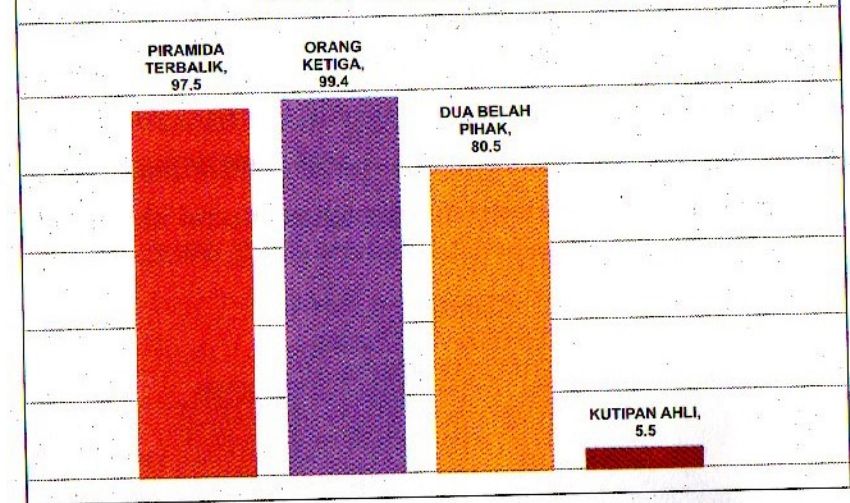
Artinya, kelima media tersebut sangat memperhatikan faktor kebaruan dan kedekatan peristiwa yang sesuai dengan kebutuhan para pembaca. Hal lain yang menarik dikemukakan adalah berita-berita politik dan hukum yang disajikan ternyata hanya sedikit memuat nilai signifikan (dampak) bagi masyarakat. Lebih menarik lagi, berita-berita politik dan hukum yang diandaikan memuat nilai konflik (kontroversi) yang tinggi ternyata sangat sedikit ditampilkan pada lima media itu.

Gambar 7
TOTAL NEWS VALUES



Kebanyakan berita-berita bertema politik dan hukum dari lima surat kabar ini memuat dua unsur nilai berita sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 7. Sementara itu hampir sepertiga berita-berita lainnya memuat tiga unsur nilai berita. Berita-berita yang memuat empat atau lima unsur nilai berita, jika keduanya digabungkan, berjumlah kurang dari seperempat berita. Gejala ini menunjukkan bahwa apabila kalangan jurnalis menemukan peristiwa-peristiwa politik dan hukum yang sudah memenuhi sedikitnya dua atau tiga kriteria nilai berita, maka kejadian-kejadian itu sudah dianggap layak untuk dijadikan berita.

Gambar 8
TEKNIK PENULISAN BERITA (%)

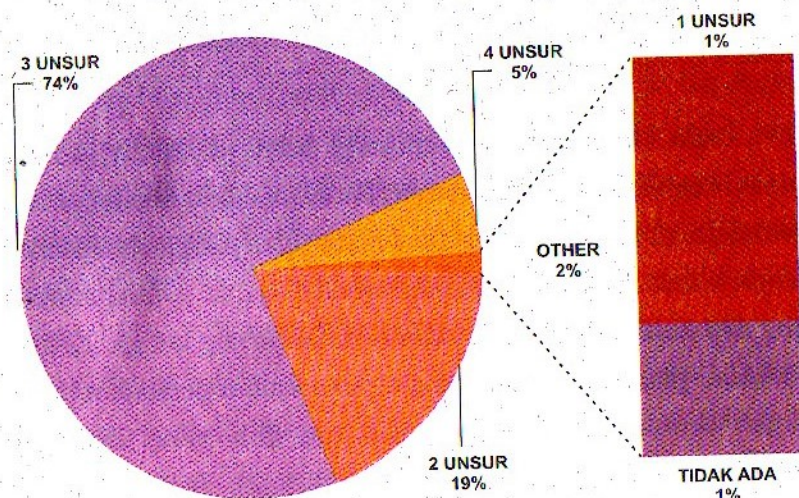


Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi jurnalis dalam menulis berita agar pemberitaannya dapat dikategorikan memenuhi obyektivitas. Pertama, fakta-fakta yang dikumpulkan disajikan dalam format piramida terbalik. Kedua, sudut pandang yang digunakan dalam penulisan adalah orang ketiga. Ketiga, dua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam persoalan harus diliput semuanya. Keempat, seorang ahli yang dianggap memiliki kepakaran dalam bidang tertentu harus dimintai komentar. Gambar 8 menunjukkan bahwa persyaratan pertama dan kedua hampir secara keseluruhan telah dipenuhi. Persyaratan ketiga telah terpenuhi oleh lebih dari tiga perempat berita yang ada.

Sementara itu, persyaratan keempat sangat sedikit yang terpenuhi. Hal itu menunjukkan bahwa pihak yang disebut

pakar selama ini belum dilibatkan secara maksimal dalam pemberitaan. Terdapat dua kemungkinan mengapa jurnalis cenderung tidak memenuhi persyaratan keempat. Pertama, jurnalis dikejar oleh rutinitas tenggat waktu (*deadline*) yang tidak bisa dikompromikan. Kedua, jurnalis tidak atau belum paham mengenai keharusan untuk mewawancarai ahli untuk memenuhi syarat obyektivitas.

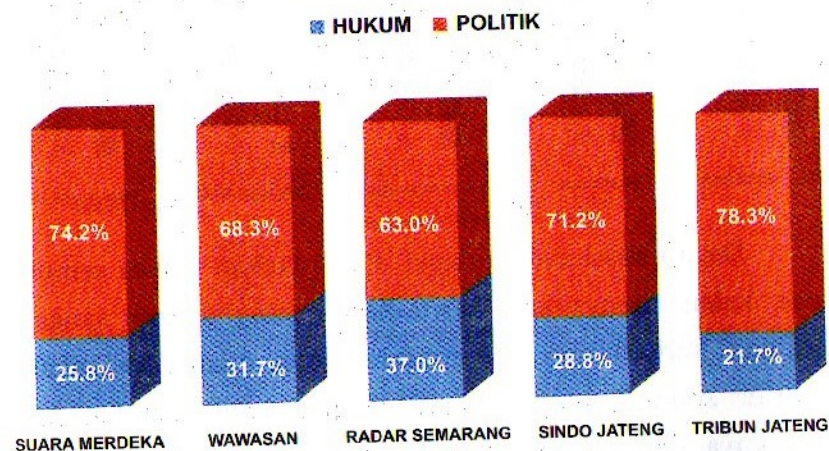
Gambar 9
KELENGKAPAN TEKNIK
PENULISAN BERITA



Hampir tiga perempat berita bertema politik dan hukum telah memenuhi tiga syarat penulisan yang obyektif sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 9. Tiga persyaratan tersebut adalah penulisan dalam format piramida terbalik, sudut pandang yang digunakan dalam penulisan adalah orang ketiga,

dan melakukan liputan terhadap dua atau lebih pihak yang terlibat. Berita-berita yang telah memenuhi semua syarat penulisan berjumlah sangat kecil, yakni hanya sebesar 5 persen. Sementara itu berita-berita yang hanya memenuhi dua syarat berjumlah hampir seperlima.

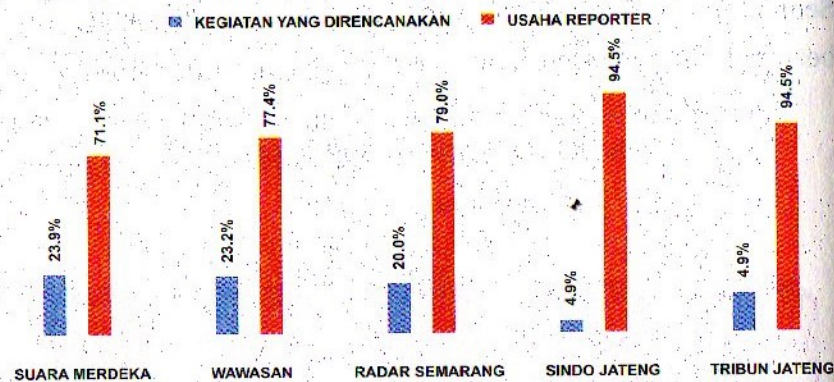
Gambar 10
TOPIK BERITA MENURUT SURAT KABAR



Gambar 10 mendeskripsikan tentang proporsi berita-berita politik dan hukum yang terdapat pada masing-masing surat kabar. Secara keseluruhan bisa dikemukakan bahwa kelima media itu lebih dominan menampilkan berita-berita bertema politik dibandingkan dengan berita-berita bertopik hukum. Perbedaannya adalah *Tribun Jateng* dan *Suara Merdeka* sedikit lebih tinggi proporsinya dalam memuat berita-berita politik dibanding tiga surat kabar lainnya. Sementara itu, *Wawasan* dan *Radar Semarang* sedikit lebih banyak proporsinya dalam menampilkan berita-berita bertopik hukum

dibandingkan ketiga media lainnya.

Gambar 11
ASAL BERITA MENURUT SURAT KABAR

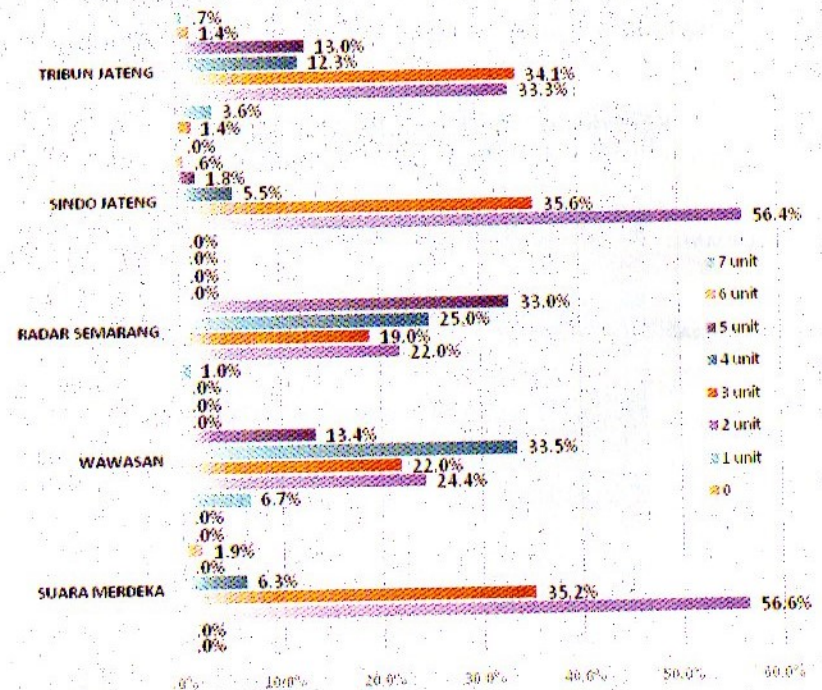


Secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa semua surat kabar menyajikan berita-berita yang secara sangat dominan berasal dari usaha-usaha yang dijalankan pihak reporter sendiri seperti dapat disimak pada Gambar 11. Sebaliknya, berita-berita yang berasal dari kegiatan yang direncanakan, misalnya saja seminar atau konferensi pers, berjumlah sangat sedikit. Proporsi tertinggi berita-berita yang berasal dari usaha yang dijalankan reporter terdapat pada Koran *Sindo edisi Jateng* yang hingga mencapai angka lebih dari 90 persen.

Sebaliknya, *Koran Sindo edisi Jateng* juga menjadi media yang proporsi berita-beritanya yang berasal dari kegiatan yang direncanakan berjumlah sangat rendah, yakni hanya sebesar hampir 5 persen. Setidaknya, secara umum, ada dua

penjelasan yang menjadikan gejala itu terjadi. Pertama, tugas rutin reporter adalah mencari berita sehingga inisiatif untuk menghubungi para narasumber telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pekerjaan yang harus diselesaikan. Kedua, tidak setiap hari suatu lembaga tertentu menyelenggarakan acara seminar, menggelar konferensi pers, atau menyebarkan *press release*.

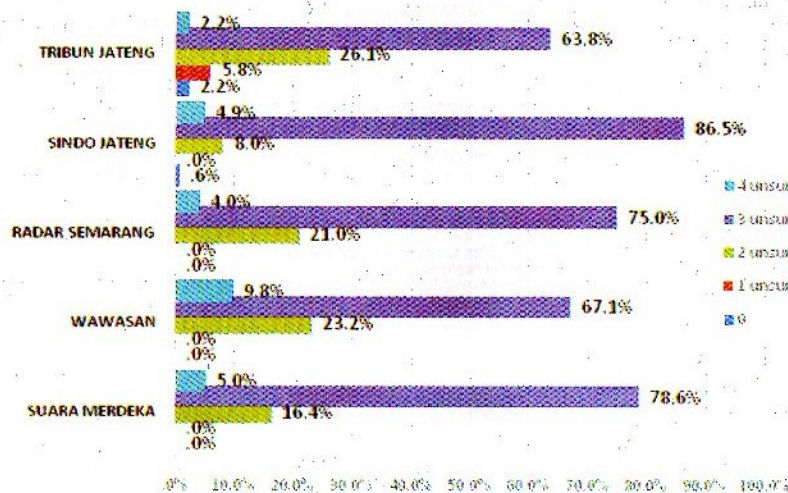
Gambar 12
JUMLAH UNIT NEWS VALUES
MENURUT SURAT KABAR



Gambar 12 menunjukkan perbandingan dari masing-masing surat kabar dalam menghadirkan jumlah nilai berita

pada berita-berita politik dan hukum. Proporsi yang paling menonjol adalah *Koran Sindo edisi Jateng* dan *Suara Merdeka* yang menghadirkan dua unit *news values* yang mencapai lebih dari 50 persen. Tiga jenis *news values* yang paling menonjol, dengan proporsi lebih dari sepertiga berita-berita yang ditampilkan, terdapat pada *Tribun Jateng*, *Koran Sindo edisi Jateng*, dan *Suara Merdeka*. Sementara itu, surat kabar yang menampilkan empat jenis *news value* dalam berita-beritanya yang mencapai angka lebih dari sepertiga adalah *Wawasan*. Secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa semua surat kabar menyajikan sekitar dua sampai lima unit *news values*.

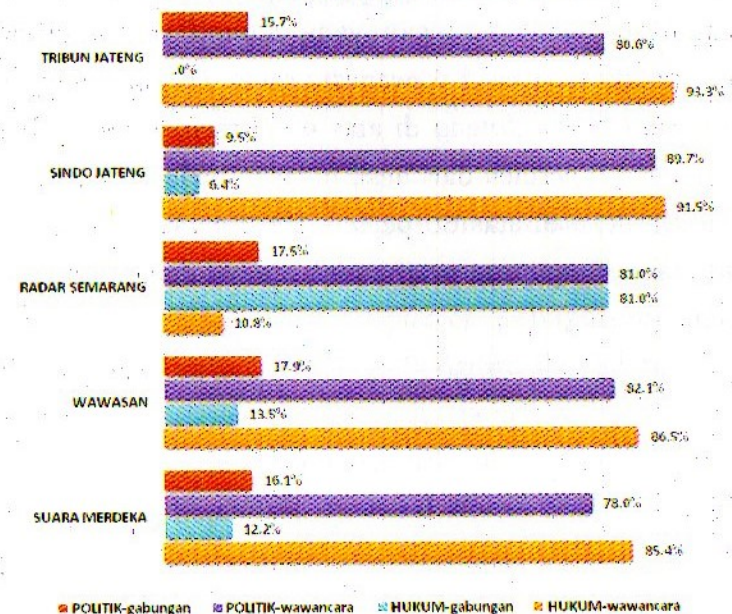
Gambar 13
KELENGKAPAN TEKNIK PENULISAN BERITA
MENURUT SURAT KABAR



Data yang disajikan pada Gambar 13 dapat dipahami sebagai uraian lebih detail dari data yang terdapat pada Gambar

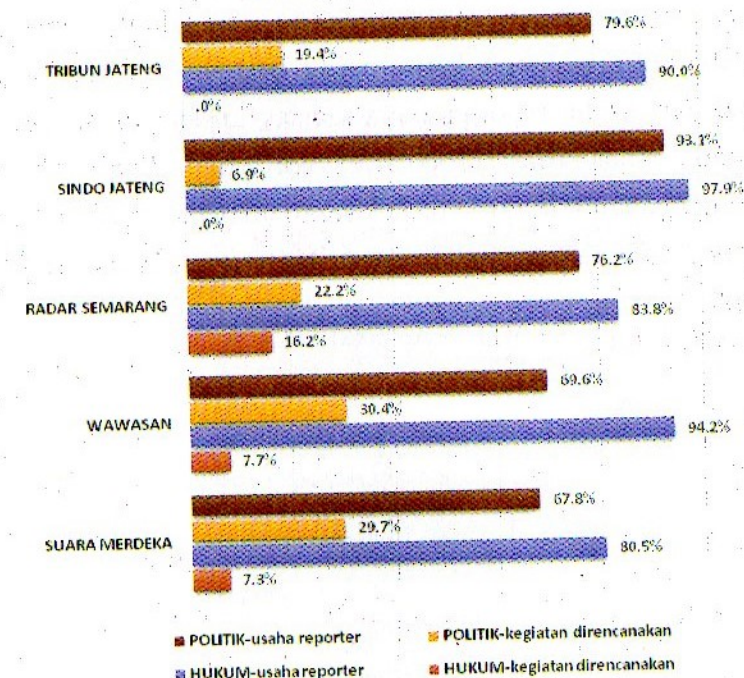
8. Seluruh surat kabar secara sangat menonjol memenuhi tiga kriteria penulisan berita yang obyektif, dalam kisaran angka di atas 60 persen (*Tribun Jateng* dan *Wawasan*), di atas 70 persen (*Radar Semarang* dan *Suara Merdeka*), dan di atas 80 persen (*Koran Sindo edisi Jateng*). Empat syarat penulisan berita obyektif dalam proporsi yang demikian kecil, yakni hampir 10 persen, terdapat pada *Wawasan*. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua surat kabar telah secara rutin menjalankan syarat-syarat penulisan berita obyektif meskipun kurang lengkap, yakni pada persyaratan meminta pendapat pihak yang dianggap memiliki kompetensi dalam bidang tertentu.

Gambar 14
CARA MENDAPATKAN BERITA POLITIK
DAN HUKUM MENURUT SURAT KABAR



Teknik yang digunakan oleh kalangan jurnalis dalam mengumpulkan berita-berita bertema politik dan hukum secara dominan adalah mewawancarai narasumber sebagaimana dapat disimak pada Gambar 14. Tidak ada satu pun berita yang data-datanya dikumpulkan melalui riset (kajian pustaka). Sementara itu, teknik observasi hanya sedikit jumlahnya atau terlalu kecil proporsinya. *Koran Sindo edisi Jateng* merupakan media yang paling menonjol dalam menyajikan berita politik yang didapatkan melalui wawancara (proporsinya hampir 90 persen). Empat surat kabar lain untuk jenis berita politik yang didapatkan melalui wawancara menunjukkan proporsi yang hampir berimbang (dalam kisaran 80 persen), kecuali *Suara Merdeka* yang proporsinya 78 persen. Pada berita-berita hukum yang didapatkan melalui wawancara, semua surat kabar menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Proporsi berita hukum dari hasil wawancara pada *Tribun Jateng* dan *Koran Sindo edisi Jateng* di atas 90 persen. Proporsi berita hukum yang diperoleh dari hasil interviu pada *Wawasan* dan *Suara Merdeka* di atas 80 persen. Pengecualian terjadi pada *Radar Semarang* yang proporsinya hanya dalam kisaran 10 persen.

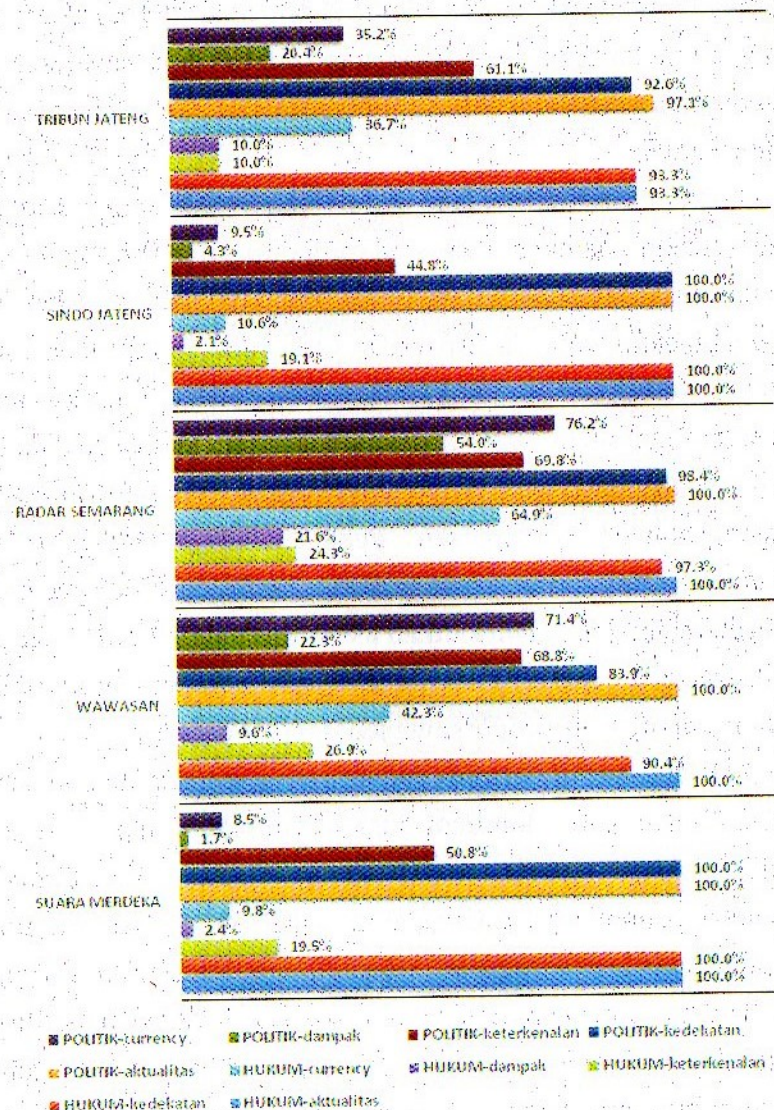
Gambar 15
ASAL BERITA POLITIK DAN HUKUM
MENURUT SURAT KABAR



Secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa asal berita politik dan hukum pada lima media tersebut merupakan usaha yang dijalankan reporter sebagaimana dapat dideskripsikan pada Gambar 15. Peristiwa alamiah terlalu kecil proporsinya. Proporsi berita-berita politik yang berasal dari usaha reporter untuk masing-masing surat kabar menunjukkan proporsi yang bervariasi. Proporsi *Koran Sindo edisi Jateng* pada berita politik berada di atas 90 persen.

Proporsi *Tribun Jateng* dan *Radar Semarang* di atas tiga perempat (75 persen). Sedangkan proporsi *Wawasan* dan *Suara Merdeka* masing-masing di atas angka 69 persen dan 67 persen. Sementara itu, proporsi berita-berita bertema hukum yang berasal dari usaha reporter pada masing-masing media juga memperlihatkan variasi. Proporsi *Tribun Jateng*, *Koran Sindo edisi Jateng*, dan *Wawasan* pada kisaran 90 persen. Sedangkan proporsi *Radar Semarang* dan *Suara Merdeka* pada kisaran 80 persen.

Gambar 16
NEWS VALUES DALAM BERITA POLITIK DAN HUKUM MENURUT SURAT KABAR



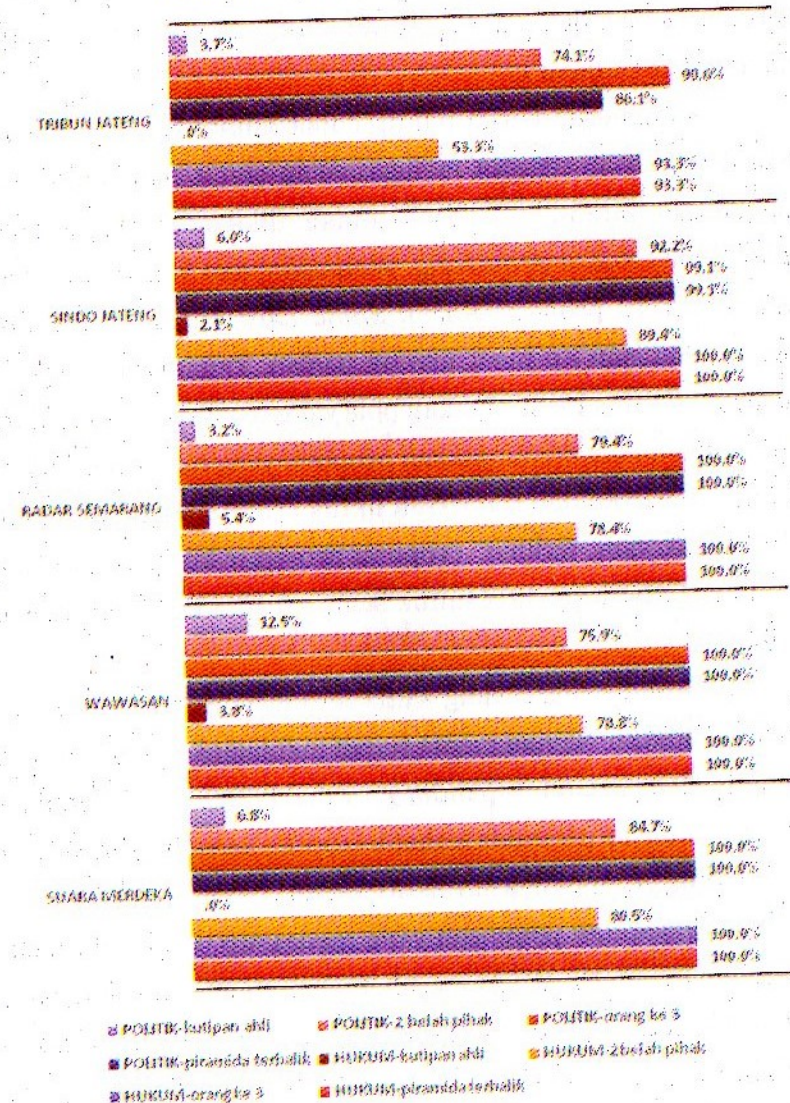
Gambar 16 menunjukkan bahwa nilai-nilai berita (*news values*) yang paling menonjol pada berita-berita politik dan hukum pada lima media adalah aktualitas dan proksimitas. Hal ini dapat dimengerti karena kelima surat kabar itu terbit harian yang menekankan sisi kebaruan suatu peristiwa serta menonjolkan aspek lokalitas untuk memenuhi kebutuhan para pembacanya.

Nilai-nilai berita lain, seperti *currency*, dampak, dan keterkenalan memang ada, tapi proporsinya terhitung kecil dibandingkan aktualitas dan proksimitas. Bahkan, nilai berita keluarbiasaan dan kontroversi juga ada, namun tidak diperhitungkan karena jumlahnya terlalu sedikit. Semua surat kabar menampilkan nilai kedekatan dengan khalayak dalam berita-berita politik yang proporsinya mencapai angka di atas 90 persen, bahkan 100 persen. Pengecualian terdapat pada *Wawasan* yang proporsinya sebesar lebih dari 80 persen. Seluruh media juga menekankan aktualitas dalam berita-berita politik yang proporsinya hingga mencapai 100 persen, kecuali *Tribun Jateng* yang proporsinya sebesar 97,1 persen.

Berita-berita bertopik hukum yang menekankan aspek proksimitas secara dominan juga ditampilkan oleh semua media. Bahkan, pada *Koran Sindo edisi Jateng* dan *Suara Merdeka* proporsinya mencapai 100 persen. Sementara itu proporsi jenis berita ini pada *Tribun Jateng*, *Radar Semarang*, dan *Wawasan* mencapai lebih dari 90 persen. Sedangkan berita-berita hukum yang menonjolkan aspek aktualitas, dengan proporsi mencapai 100 persen, ditunjukkan oleh semua media,

kecuali *Tribun Jateng* yang proporsinya sebesar 93,3 persen.

Gambar 17
TEKNIK PENULISAN BERITA POLITIK DAN HUKUM MENURUT SURAT KABAR



Prosedur penulisan berita-berita politik dan hukum yang obyektif sudah dijalankan oleh semua media. Setidaknya, tiga syarat sudah dijalankan, yakni meliput dua atau lebih pihak yang terlibat, menggunakan sudut pandang penulisan orang ketiga, serta penulisan dengan format piramida terbalik. Hal itu dapat dibaca pada Gambar 17.

Pada berita-berita politik dapat dilihat bahwa proporsi syarat penulisan dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga dan piramida terbalik sudah dilakukan sepenuhnya (100%) oleh *Radar Semarang*, *Wawasan*, dan *Suara Merdeka*. Sementara itu proporsi *Koran Sindo edisi Jateng* untuk dua syarat penulisan itu mencapai 99 persen. *Tribun Jateng* pada kasus yang sama menunjukkan pola yang bervariasi. Sementara itu, semua media menunjukkan proporsi yang bervariasi antara di atas 70 persen dan 90 persen untuk syarat meliput dua atau lebih pihak yang terlibat. Proporsi prosedur kutipan dari ahli pada berita-berita politik untuk semua media terhitung masih sedikit.

Kecenderungan yang sama terdapat pada berita-berita bertopik hukum. Semua media sudah menjalankan persyaratan menulis dengan sudut pandang orang ketiga dan memakai format penulisan piramida terbalik (100%), kecuali pada *Tribun Jateng* yang proporsinya di atas 90 persen.

Persyaratan penulisan yang mencakup dua belah pihak atau lebih yang terlibat memperlihatkan proporsi yang beragam, dalam kisaran angka di atas 50 persen dan 80 persen. Proporsi penulisan berita yang melibatkan kutipan dari pihak yang

dianggap ahli di bidangnya menunjukkan proporsi yang sangat rendah. Bahkan, berita-berita *Tribun Jateng* dan *Suara Merdeka* sama sekali tidak memuat pernyataan dari kalangan pihak yang berkompeten di bidang hukum.

Penutup

1. Obyektivitas pemberitaan merupakan sisi lain dari independensi media. Artinya adalah independensi merupakan proses para wartawan dalam melakukan liputan terhadap suatu peristiwa sampai dihadirkan sebagai berita di hadapan pembaca. Sementara itu, obyektivitas pemberitaan merupakan hasil kerja yang dilakukan kalangan wartawan yang tidak mendapatkan intervensi dari pihak mana pun. Terdapat pengandaian bahwa semakin obyektif pemberitaan yang diproduksi oleh wartawan, maka semakin independen pula para jurnalis dalam proses pembuatan berita. Obyektivitas pemberitaan pada kondisi semacam itu adalah bukti media mampu menunjukkan tindakan tidak berpihak (*impartial*) dan tidak pula memberi dukungan (*nonpartisanship*) terhadap pihak-pihak tertentu yang diliput media.
2. Apabila dilihat dari empat syarat penulisan berita obyektif, yakni: (1) penyajian fakta-fakta mengikuti kaidah piramida terbalik; (2) sudut pandang atau perspektif penulisan adalah orang ketiga (*third person*); (3) dua atau lebih pihak yang terlibat dalam pemberitaan diliput semua; dan (4) mewawancarai pihak yang dianggap berkompetensi dalam

bidang kajian yang sedang dijadikan materi liputan, maka lima media yang terbit di Semarang setidaknya telah memenuhi tiga persyaratan pertama. Narasumber yang dikategorikan sebagai pakar atau pengamat, ternyata, belum menjadi pihak yang dianggap penting oleh media dalam pemberitaan. Dengan demikian, dari sisi teknis-prosedural penulisan berita obyektif dapat dikemukakan bahwa media memang sudah menjalankannya. Tapi, aspek teknis-prosedural penulisan yang sebagian besar telah terpenuhi tidak berbanding lurus dan belum tentu mencerminkan aspek obyektivitas yang bersifat substansial. Misalnya, dalam aspek *tone* (nada) pemberitaan apakah media menunjukkan keberpihakan dan wartawan sudah mampu memisahkan secara tegas fakta dengan opini, belum bisa terjawab secara terukur.

3. Apabila politik dan hukum merupakan dua hal yang berkepentingan dengan hajat hidup orang banyak, maka dalam penelitian ini ditemukan suatu paradoks. Apa yang disebut sebagai berita-berita bertema politik dan hukum ternyata memuat nilai berita dampak (*impact*) yang rendah bagi masyarakat. Memang benar bahwa berita-berita politik dan hukum telah memenuhi nilai aktualitas dan proksimitas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hanya saja kalau muatan keberartian atau kepentingan itu bernilai rendah bagi masyarakat, maka berita-berita itu sekadar menjadi rutinitas bacaan yang sedikit pula bersinggungan dengan

kebutuhan konkret masyarakat. Obyektivitas pemberitaan yang sekadar menyentuh aspek kedekatan (ruang) dan kebaruan (waktu) bagi pembaca, tapi kurang menghadirkan nilai kepentingan yang pantas bagi khalayak, maka pada akhirnya menjadi ritual media yang tidak mampu menciptakan dorongan bagi publik untuk berpartisipasi dalam persoalan-persoalan nyata mereka.

4. Setidaknya ada tiga metode yang diterapkan oleh wartawan dalam mengumpulkan berita, yaitu wawancara, observasi (pengamatan), dan riset. Wartawan juga bisa memadukan dua atau tiga metode itu sekaligus. Penelitian ini menunjukkan bahwa berita-berita secara dominan merupakan hasil wawancara. Observasi hanya sedikit dijalankan. Bahkan, riset (misalnya, studi kepustakaan atau kajian terhadap data-data sekunder) sama sekali tidak pernah dikerahkan. Tidak janggal apabila berita-berita pun sekadar berisi rangkuman wawancara yang dilakukan wartawan dengan narasumber. Apa yang disebut sebagai obyektivitas sekadar tindakan konfirmasi tanpa didukung oleh bukti-bukti riset atau data yang memadai. Obyektivitas hanya menjadi problem persepsi karena terlalu miskin data dan bahkan nihil pembuktian.
5. Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kelebihan dan, serentak dengan itu, juga kelemahan. Kelebihannya adalah metode ini mampu memberikan berbagai data kuantitatif, dari topik berita sampai nilai-nilai

berita (*news values*) yang dihadirkan oleh masing-masing media. Analisis isi juga bisa menunjukkan pola-pola pemberitaan yang telah menjadi rutinitas harian kalangan wartawan. Sehingga, generalisasi terhadap berbagai kebiasaan penulisan berita obyektif yang dijalankan wartawan mampu didapatkan. Kekurangannya adalah analisis isi hanya mampu mendeskripsikan sisi permukaan (*manifest*), namun tidak bisa menyingkap sisi tersembunyi (*latent*), yang terdapat dalam pemberitaan. Padahal, obyektivitas tidak hanya berkaitan dengan problematisasi permukaan kebahasaan berita, namun melainkan juga sisi makna yang diselubungkan dalam aneka tanda. Dalam sudut pandang demikian, maka memadukan analisis isi dengan analisis bingkai (*frame analysis*) atau metode semiotika untuk melihat sisi permukaan dan wilayah kedalaman bahasa menjadi langkah yang layak diperhitungkan.

Media massa dinilai sebagai ruang publik yang menyajikan informasi kritis. Juga sebagai pengontrol penyelenggaraan kekuasaan, dinamika sosial, dan praktik bisnis. Tapi, kegemilangan itu merupakan panggung depan belaka. Bagaimana dengan potret di balik panggung?

Buku ini menyajikan kesaksian beberapa jurnalis dan redaktur dalam mendapatkan berbagai intervensi, tekanan hingga ancaman. Intervensi datang dari narasumber yang punya kepentingan, redaktur hingga pemilik media.

Akibatnya, sajian media diciptakan bukan untuk kepentingan publik. Tapi, kepentingan siapa? Buku ini memberikan jawaban.

Mendorong media profesional dan independen merupakan usaha yang tiada akhirnya. Mendorong media memiliki garis api (*firewall*) yang memisahkan ruang redaksi dengan ruang iklan; media menyediakan saluran protes masyarakat jika merasa dirugikan atas pemberitaan; Terakhir, kesejahteraan jurnalis yang minim akibat praktik konglomerasi juga harus terus diperjuangkan.



ISBN: 978-602-9697-22-3

